

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BANTAN
TAHUN 2025-2030

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Camat
Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis				

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTAN
TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Camat
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.	Predikat di dapat dari Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Camat
3.	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
4.	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
5.	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
6.	Nilai Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris

7.	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP	Nilai ini diperoleh dari Hitungan Komposit. Data yang dipersiapkan jumlah SOP yang tersedia untuk pelayanan publik, Persentase kesesuaian Persyaratan SOP dengan rumus Jumlah persyaratan sesuai SOP setiap pelayanan publik yang dilakukan dibagi dengan jumlah persyaratan SOP x 100%.	$\frac{\text{Jumlah Persentase Keterpenuhan Persyaratan setiap layanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik Keseluruhan}} \times 100$	Eselon IV
8.	Persentase Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas	Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti sebatas wewenang bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan. Gangguan Kamtibmas dimaksud antara lain Penyakit Masyarakat (Balapan Liar, Pemakaian Knalpot Brong, Minuman Keras Jenis Tuak, Pergaulan Bebas Remaja)	$\frac{\text{Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtibmas selama satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
9.	Persentase Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana yang menjadi objek penilaian merupakan sarpras yang berada di pelayanan publik (Paten).	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarpras di pelayanan publik (Paten)}} \times 100$	Eselon IV
10.	Persentase Desa Mandiri	Nilai diperoleh dari IDM (Indeks Desa Membangun) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni 1.Desas Sangat Tertinggal, 2.Desas Tertinggal, 3.Desas Berkembang, 4.Desas Maju dan 5.Desas Mandiri.	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Eselon IV

INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG KECAMATAN BANTAN

1.	Persentase Pelayanan Publik Yang diberikan tepat waktu	Pelayanan Publik Yang diberikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik diberikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang masuk selama satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
2.	Persentase Penyelesaian Pengaduan pelayanan publik tepat waktu	Pengaduan Masyarakat sebatas pada pelayanan publik yang ada di Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan pelayanan publik dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik dalam satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
3.	Persentase Aparatur yang Berkompeten	Persentase ASN diperoleh berdasarkan kompetensi yang ada pada ASN tersebut sesuai bidang keahliannya.	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Berkompetensi}}{\text{Jumlah ASN Perangkat Daerah}} \times 100$	Eselon IV
4.	Persentase Penyakit Masyarakat yang ditindak lanjuti sampai tuntas	Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dapat ditindaklanjuti sebatas kewenangan dan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Seperti : (Balapan Liar, Pemakaian Knalpot Brong, Minuman Keras Jenis Samsu, Pergaulan Bebas Remaja)	$\frac{\text{Jumlah Penyakit Masyarakat yang ditindak lanjuti sampai tuntas}}{\text{Jumlah Penyakit Masyarakat selama satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
5.	Persentase Dukungan Kebencanaan di lingkungan kecamatan yg ditindaklanjuti	Kebencanaan di lingkungan Kecamatan yang ditindaklanjuti sebatas kewenangan dan tugas Kecamatan seperti bantuan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bantuan kepada masyarakat korban banjir, dan korban kebakaran rumah penduduk.	$\frac{\text{Jumlah Kebencanaan di lingkungan kecamatan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kebencanaan di lingkungan kecamatan}} \times 100$	Eselon IV

6.	Persentase tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan	Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang tersedia sebatas pada sarpras yang ada di ruang pelayanan (PATEN)	$\frac{\text{Jumlah Sarpras yang tersedia pada Pelayanan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarpras Pelayanan}} \times 100$	Eselon IV
7.	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan	Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang dipelihara sebatas pada sarpras yang ada di ruang pelayanan (PATEN)	$\frac{\text{Jumlah Pemeliharaan Sarpras Pelayanan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Sarpras Pelayanan}} \times 100$	Eselon IV
8.	Persentase Monitoring dan evaluasi APBDes yang terlaksana	Kegiatan ini termasuk kegiatan lomba desa, monitoring dan evaluasi APBDes serta kegiatan yang terkait dengan penilaian Desa.	$\frac{\text{Realisasi Monitoring dan evaluasi APBDes yang terlaksana}}{\text{Target Monitoring dan evaluasi APBDes}} \times 100$	Eselon IV
9.	Persentase usulan Prioritas Pembangunan yg diverifikasi	Usulan Prioritas pembangunan yang dimaksud yakni usulan yang dientri oleh setiap Desa dari hasil musrenbang desa ke aplikasi SIPD RI. Dimana usulan yang dihitung berdasarkan usulan yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan selanjutnya usulan di Verifikasi oleh pihak kecamatan.	$\frac{\text{Realisasi usulan Prioritas Pembangunan yg diverifikasi}}{\text{Jumlah Usulan Prioritas Pembangunan pada SIPD RI}} \times 100$	Eselon IV
10.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini terdiri dari MTQ Kecamatan, MTQ Kabupaten, Safari Ramadhan Kecamatan, Fasilitas Hari Besar Nasional dan Keagamaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah, Fasilitas Bantuan Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Penanggulangan Stunting, Fasilitas Kegiatan Olahraga.	$\frac{\text{Realisasi Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana}}{\text{Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100$	Eselon IV
11.	Persentase Fasilitas Pemerintahan Umum yang terlaksana	Kegiatan sebatas pada lingkup tugas dan tanggung jawab seksi tata pemerintahan.	$\frac{\text{Realisasi Fasilitas Pemerintahan Umum yang terlaksana}}{\text{Jumlah Fasilitas Pemerintahan Umum yang ada}} \times 100$	Eselon IV

Bantani, Agustus 2025
 CAMAT BANTANI

 RAFLU KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
 Pembina
 NIP. 19871112 200701 1 003